

The Role of Departement of Transfortation Sikka District to Optimization of The Function of Lokaria Terminal, Kangae Sub-District

Maria Nona Isa*, Danar Aswim

Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere
Jln. Jedral Sudirman, Waioti, Maumere Nusa Tenggara Timur

¹Isa521238@gmail.com*

²danaraswim@gmail.com

(Received: 2 Agustus 2022 / Accepted: 23 Nov 2022/Published Online: 3 Juni 2023)

Abstarct

This study aims to determine the extent of the role of the Department of Transportation in Optimizing the Functions of Public Transport Terminals at Lokaria Terminal, Kangae District and what constraints are experienced by the Department of Transportation in optimizing the function of the terminal. This study uses a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Informants involved in this study were at the Sikka District Transportation Service section of the Traffic and road transport section, and Lokaria Terminal Users. Data Collection Techniques used are Observation, Interview, and Documentation Techniques. Data analysis techniques include data reduction (data reduction), data display (data presentation) and conclusion drawing/verification (withdrawal of conclusions). The research results obtained are efforts made by the Department of Transportation such as inviting the public and terminal users to maintain and care for existing terminal facilities even though they are minimal, coordination with Terminal users (entrepreneurs and drivers) to make optimal use of the terminal, Increased awareness of Terminal users including with motorcycle taxi drivers to make the best use of the terminal location, and plan to build a new terminal. However, in carrying out its role the Department of Transportation encounters obstacles or obstacles, namely the limited number of officers and the officials who manage the terminal do not have special knowledge of the terminal, the location of the Lokaria Terminal which does not accommodate all transportation, there is no good cooperation between the Department of Transportation and other stakeholders, the lack of support from policy makers. This research suggests that the government Department of Transportation provide infrastructure at the lokaria terminal, increase the number of employees, make a clear work plan, take a firm stand against violations committed by Lokaria Terminal users so that they can carry out their role optimally.

Keywords: Role, Department of Transportation, Terminal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Angkutan Umum di Terminal Lokaria, Kecamatan Kangae dan Kendala apa saja yang di alami oleh Dinas Perhubungan dalam mengoptimalkan fungsi terminal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber Data yang digunakan yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka bagian Seksi Lalu Lintas dan angkutan jalan, dan Pengguna Terminal Lokaria. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis data meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (Pengarikan Kesimpulan). Hasil penelitian yang di dapatkan yaitu upaya telah dilakukan Dinas Perhubungan seperti mengajak masyarakat serta para pengguna terminal untuk menjaga dan merawat sarana terminal yang ada walaupun minim, koordinasi dengan para pengguna Terminal (pengusaha dan sopir) untuk memanfaatkan terminal secara optimal, Peningkatan kesadaran para pengguna Terminal termasuk dengan para Tukang Ojek agar memanfaatkan lokasi terminal dengan sebaik-baiknya, dan merencanakan pembangunan Terminal baru. Namun, dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan mendapatkan kendala atau hambatan yaitu jumlah aparat yang terbatas serta aparat yang mengelola terminal tidak memiliki pengetahuan khusus terminal, lokasi Terminal Lokaria yang tidak cukup menampung seluruh angkutan, belum ada kerjasama yang baik antara Dinas Perhubungan dan stakeholder lainnya, kurang adanya dukungan dari

para pengambil kebijakan. Penelitian ini menyarankan pemerintah Dinas Perhubungan menyediakan prasarana di terminal lokaria, menambah jumlah karyawan, membuat rencana kerja yang jelas, bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna Terminal Lokaria sehingga dapat menjalankan perannya dengan maksimal.

Kata kunci : Peran, Dinas Perhubungan, Terminal.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial yang memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan, dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Namun, Indonesia juga merupakan Negara kepulauan yang dalam mengatur rumah tangga negaranya dibuatlah sistem otonomi daerah.

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai peran pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang transportasi dan angkutan jalan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Oleh karena itu sarana dan prasarana perlu disediakan oleh pemerintah agar mendukung jalannya transportasi dari suatu daerah. Hal ini agar menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pemerintah dan pengguna jasa transportasi seperti yang dikatakan oleh Narwoko peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut menjalankan suatu peran [1].

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian salah satu tugas dari Dinas Perhubungan dalam hal ini Seksi Lalu Lintas yaitu mengawasi lalu lintas yang ada di kota maumere, meliputi kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional. Pengawasan operasional Terminal agar adanya kenyamanan dan keamanan pengguna jasa Terminal juga perlu diperhatikan oleh Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta pemindahan moda angkutan [2]. Pengelolaan Terminal oleh Dinas Perhubungan perlu dilakukan dengan baik diantaranya harus menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang. Salah satu terminal di kota Maumere yang menjadi bagian tugas pengawasan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perubungan Kabupaten Sikka dalam hal ini Seksi Lalu Lintas adalah Terminal Lokaria di Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.

Seperti apa yang terjadi di Terminal Lokaria dengan kondisi prasarana terminal yang kurang memadai seperti halte yang rusak, toilet yang tidak berfungsi serta terminal yang tidak terawat dan terjadi parkir angkutan umum di simpang jalan trans Maumere Larantuka sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan disekitar jalan tersebut dan sering pula terjadi konflik antara sesama awak kendaraan angkutan umum. Karena pengelolaan Terminal Lokaria saat ini masih kurang teratur, menimbulkan kemacetan, bahkan kecelakaan lalu lintas. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi [3]. Peran dari Dinas Perhubungan berorientasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka meminimalisir terjadinya salah fungsi terminal oleh pengguna terminal, hal ini juga tidak terlepas dari kendala kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Dalam menjalankan tugasnya di terminal.

Melihat data pengamatan yang menunjukkan pengelolaan Terminal Lokaria dengan kondisi terminal dengan prasarana yang kurang memadai, tentunya hal ini bertolak belakang dengan apa yang seharusnya terjadi. Maka dengan permasalahan yang telah disebutkan peneliti bermaksud mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dan kendala apa saja yang di alami Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Terminal Lokaria. Sesuai bidang keilmuan dalam penelitian berbasis pengawasan pengelolaan terminal.

Peneliti mengkaji dengan menggunakan teori peran organisasi sektor publik oleh Jones dalam mashun (2009-9) sebagai berikut [4]:

a. *Regulatory Role*, Organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat.

b. *Enabling Role*, adalah peran organisasi dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukan masyarakat.

c. *Direct Provision Of Goods and Service*, karena semakin kompleksnya area yang harus di cover oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi.

Penelitian lebih fokus pada peran Dinas Perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal lokaria kecamatan kangae. Kenyamanan pengguna terminal menjadi sasaran utama Dinas Perhubungan dalam *regulatory role* atau berperan mengatur, *enabling role* atau menjamin terlaksananya peraturan tersebut dan *direct provision of goods and service* atau berkaitan dengan pembiayaan.

Sedangkan pada penelitian terdahulu yang oleh Renaldi Saputra lebih berfokus pada peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal di handil dua kelurahan muara jawa pesisir kecamatan muara jawa kabupaten kutai kartanegara. Namun, penelitian ini lebih fokus mengenai sejauh mana peningkatan retribusi terminal di handil dua kelurahan muara jawa pesisir kecamatan muara jawa kabupaten kutai kertanegara[5]

Berdasarkan permasalahan tersebut dan dengan referensi dari penelitian terdahulu maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut dan faktor-faktor penghambatnya.

III. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu [6]. Dalam metode penelitian kualitatif ini peneliti mengkaji peran Dinas Perhubungan dalam optimalisasi fungsi Terminal angkutan umum di Terminal Lokaria, Kecamatan Kangae. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data [7]. Sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, informan yang terpilih dalam peneliti ialah para pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka dan para Pengguna Terminal Lokaria. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari buku referensi dan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Zuchri Abdussamad teknik dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* [8].

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Lokaria

Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Lokaria
Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka mempunyai peran penting dalam pengawasan dan pengaturan lalu lintas di Terminal Lokaria, Kecamatan Kangae. Untuk mengetahui peran penting Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, peneliti mengkaji dengan menggunakan teori peran organisasi sektor publik oleh Jones sebagai berikut:

a. *Regulatory Role*

Organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat [4]. Pada indikator ini sektor publik dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hilarius Rangga Mesa selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beliau mengatakan bahwa dalam menjalankan peran menertibkan angkutan di Terminal Lokaria kami merencanakan berbagai program diantaranya yaitu : Program yang pertama yaitu penguatan status Terminal Lokaria atau memberi sosialisasi mengenai kepastian tipe Terminal yang sesuai dengan fasilitas dan fungsinya, seperti terlihat selama ini Terminal Lokaria kurang mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan. Pentingnya penguatan status terminal ke dalam tipe B ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, dimana pada tipe kedua yaitu tipe B hanya adanya trayek AKDP (angkutan antar kota dalam provinsi), dan ADPS (angkutan perkotaan atau angkutan pedesaan) [9] yang memasuki Terminal Lokaria. Hal ini menjadi dasar utama dalam penguatan status Terminal Lokaria agar terminal bisa digunakan sesuai dengan fungsinya.

Program kedua yaitu pemberdayaan terminal ini direncanakan oleh Dinas Perhubungan namun jumlah aparat Dinas Perhubungan yang kurang serta kondisi terminal yang kurang memadai ini menghambat pelaksanaan bisa berjalan sesuai rencana. Dalam memberdayakan Terminal Lokaria ini pihak Dinas Perhubungan masih mengelolanya sendiri dikarenakan belum adanya kerja sama yang baik dengan beberapa stakeholder seperti pihak kepolisian, organda, jasa raharja, pengusaha mobil, para sopir, dan masyarakat umum.

Program ketiga yaitu merehabilitasi terminal, program ini tak kalah penting dari kedua program diatas. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa prasarana Terminal Lokaria tidak memenuhi standar kelayakan terminal tipe B, diantaranya lokasi terminal yang terlihat sempit ini tidak bisa menampung semua angkutan yang masuk ke Terminal Lokaria, rambu rambu lalu lintas yang sudah tidak terlihat di terminal, toilet yang kurang layak untuk digunakan, serta sampah yang berserakan di terminal membuat para penumpang tidak nyaman untuk menunggu angkutan di dalam terminal dan lebih memilih menunggu angkutan di badan jalan trans Maumere-Larantuka Maumere-Ende. Selain ketiga program tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka juga berencana untuk membangun terminal tipe C yang akan berlokasi di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante.

b. Enabling Role

Pada indikator ini peran organisasi adalah menjamin terlaksananya peraturan atau program yang sudah ditetapkan [4]. Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka memiliki kewenangan dalam mengatur dan menertibkan serta menjalankan peraturan yang berlaku dalam bidang Perhubungan. Penertiban angkutan umum menjadi salah satu cara untuk efek jera kepada sopir angkutan yang melanggar peraturan dalam bidang perhubungan. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar tercapainya fungsi Terminal dengan sebaik-baiknya, diantaranya mengajak masyarakat serta para pengguna terminal untuk menjaga dan merawat sarana terminal yang ada walaupun minim, koordinasi dengan para pengguna terminal (pengusaha dan sopir) untuk memanfaatkan Terminal seoptimal mungkin, Peningkatan kesadaran para pengguna terminal termasuk dengan para Tukang Ojek agar memanfaatkan lokasi Terminal dengan sebaik-baiknya, Merencanakan pembangunan Terminal baru. Namun upaya - upaya ini belum bisa mengoptimalkan fungsi Terminal sebagaimana mestinya, dikarenakan kondisi terminal yang tidak memadai dan rencana rehabilitasi terminal serta pemberdayaan terminal pun belum bisa dilakukan karena masih menunggu dana dan yang berwenang dalam hal ini yaitu seksi sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan, maka dari itu yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka hanya melakukan penjagaan setiap hari kerja kecuali hari libur. Selain itu tidak masuknya angkutan ke dalam terminal ini juga mempersulit petugas dalam menjalankan perannya, seperti yang dikatakan Bapak Randi salah satu sopir angkutan desa beliau mengatakan tidak ada pelayanan yang baik dari para petugas yang berada di Terminal Lokaria, seperti tidak mengarahkan angkutan untuk masuk ke dalam Terminal Lokaria sebaliknya para petugas hanya duduk menunggu pembayaran retribusi terminal dari pengguna terminal. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka juga mempunyai program tambahan untuk mendukung program lainnya yaitu merehabilitasi Terminal Lokaria dan merencanakan pembangunan terminal tipe C di Desa Wairkoja agar mendukung transportasi angkutan jalan di wilayah Kabupaten Sikka.

c. Direct Provision Of Goods and Service

Semakin kompleksnya area yang harus di cover oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung [4] maka dibutuhkan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka untuk melakukan pengawasan. Dinas Perhubungan memiliki tugas

mengawasi program-program serta mengevaluasinya agar program tersebut dapat berjalan baik pada periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan Terminal Lokaria Kecamatan Kangae, pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan sudah berjalan cukup baik namun belum maksimal, ini dikarenakan kondisi terminal yang buruk, prasarana yang telah dimakan usia bahkan tidak adanya rambu rambu lalu lintas di sekitar terminal, serta jumlah dan pendidikan para petugas yang minim menyebabkan Terminal Lokaria terlihat sangat tidak teratur. Di sisi lain, Dinas Perhubungan telah berupaya untuk membangun Terminal tipe C di Desa Wairkoja, hal ini agar membantu pengurangan jumlah trayek dan membantu mengoptimalkan kembali fungsi Terminal Lokaria. Namun hingga pada saat ini masih belum ada kejelasan mengenai hal tersebut.

2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Lokaria

Dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan mendapatkan kendala atau hambatan diantaranya yaitu :

a. Lokasi Terminal

Lokasi Terminal Lokaria yang tidak strategis dimana lokasi yang sempit ini tidak bisa menampung semua angkutan. Dengan 58 jumlah transportasi terbagi diantaranya angkutan kota 12 unit, angkutan desa 56 unit, AKDP 16 unit dengan totalnya 58 angkutan ini tidak bisa semuanya masuk ke dalam Terminal Lokaria.



Sumber: Kamera pengambilan data 2022

Gambar 1
Lokasi Terminal Lokaria

b. Prasarana Terminal

Untuk kendala yang kedua yaitu prasarana terminal yang tidak memenuhi standar kelayakan terminal, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi yaitu prasarana Terminal yang kurang memadai, terlihat halte penumpang yang tidak terawat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada, toilet yang juga tidak terawat dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu Vemika sebagai calon penumpang beliau mengatakan halte penumpang kurang ada kebersihan dan toilet yang dikunci oleh petugas membuat para penumpang harus mencari toilet di rumah masyarakat sekitar terminal, ini membuat para penumpang tidak nyaman menunggu angkutan di dalam terminal dan lebih memilih untuk menunggu di badan jalan trans Maumere-Larantuka Maumere Ende.

c. Ratio Petugas Terminal yang Belum Memenuhi Standar

Dapat dilihat dari aparat yang mengelola terminal tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan khusus terminal, dan jumlah aparat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya penertiban angkutan di terminal.

Tabel 1. Nama dan Jumlah Petugas Dishub di Terminal Lokaria

NO	NAMA PETUGAS	PENDIDIKAN
1	Sukardi (Kepala Terminal)	SMA
2	Carol Yohanes Paulus	S1
3	Leanatalia Tome	D4 Transportasi Darat
4	Yongky Bayk	D3 LLAJ
5	Herman Yosep	SMA
6	Fransiskus Xaverius	SMA
7	Dominikus Muda	SD
8	Rudisiswanto	STM

(Sumber: Dinas PerhubunganKabupaten Sikka)



Sumber :Kamera Pengambilan Data 2022

Gambar. 2

Petugas Dinas Perhubungan yang sedang menertibkan angkutan

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti bahwa para petugas Dinas Perhubungan yang berada di Terminal Lokaria belum menjalankan tugasnya secara maksimal, para petugas terminal tidak mengarahkan angkutan untuk masuk ke dalam terminal tetapi hanya menunggu di dalam terminal untuk memeriksa kelengkapan uji KIR kendaraan dan pembayaran retribusi dari pengguna terminal kepada petugas terminal.

b. Kerja sama

Dalam mengelola Terminal Lokaria hingga saat ini masih di kelola sendiri oleh Dinas Perhubungan. Belum ada kerja sama yang baik dengan stakeholder diantaranya Dinas Perhubungan Provinsi (UPTD), Kepolisian RI (Kasat Lantas), Jasa Raharja, Pengusaha Mobil, Para Sopir, Organda, Masyarakat Umum lainnya. Selain itu pihak Dinas Perhubungan juga belum mendapat dukungan dan para pengambil kebijakan.

Hasil penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu oleh Renaldi Saputra lebih fokus pada pengelolaan retribusi dengan cara memberikan pembinaan, penyuluhan kepada pengguna terminal dan masyarakat setempat. Namun, pengelolaannya belum maksimal karena terdapat beberapa hambatan seperti pengajuan proposal yang tiap tahunnya harus melalui tahapan lolos verifikasi lolos proposal.

Sedangkan berdasarkan Hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti saat ini lebih berorientasi kepada tugas dan wewenang Dinas Perhubungan sebagaimana yang ditemukan berbagai upaya telah dilakukan Dinas Perhubungan seperti mengajak masyarakat serta para pengguna terminal untuk menjaga dan merawat sarana terminal yang ada walaupun minim, koordinasi dengan para pengguna Terminal (pengusaha dan sopir) untuk memanfaatkan terminal seoptimal mungkin, peningkatan kesadaran para pengguna Terminal termasuk dengan para Tukang Ojek agar memanfaatkan lokasi terminal dengan sebaik-baiknya, dan Merencanakan pembangunan Terminal baru. Dengan menggunakan teori Jones dalam Mashun (2009-9) dan menurut penuturan narasumber selama ini Dinas Perhubungan belum bisa menjalankan tugasnya secara optimal dikarenakan terdapat beberapa

kendala yang menghambat pengelolaan terminal lokaria lokasi terminal yang tidak strategis, prasarana terminal yang kurang memadai, ratio petugas terminal yang belum memenuhi standar, kerja sama antar pihak pengelola atau stakeholder lain belum berjalan dengan baik. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan oleh Dinas Perhubungan di Terminal Lokaria kecamatan kangae tentunya menjadi perhatian dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan terutama kendala yang terjadi pada upaya peran Dinas Perhubungan maupun masyarakat dan para pengguna Terminal Lokaria seperti sopir angkutan, tukang ojek dan penumpang.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Lokaria, maka disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan dalam menjalankan perannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan yaitu lokasi terminal yang kurang strategis, prasarana terminal yang tidak memenuhi standar kelayakan terminal, ratio petugas terminal seperti kurangnya anggota petugas terminal dan petugas tidak memiliki pengetahuan khusus terminal, dan belum ada kerja sama yang baik antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka dengan stakeholdernya. Ini menyulitkan para petugas dalam melakukan tugasnya menertibkan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka agar lebih serius dalam menertibkan angkutan di Terminal Lokaria seperti memberi sanksi yang berat bagi pelanggar, kembali merehabilitasi terminal agar terlihat nyaman digunakan oleh pengguna terminal, mensosialisasikan kepada masyarakat agar bersama sama menjaga terminal, menambah jumlah petugas, serta membangun kerja sama yang baik antara Dinas Perhubungan dan stakeholder pengelola terminal seperti para pengusaha, organda, kepolisian, dan jasa raharja.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Narwoko, Dwi. (2006). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta : Kencana
- [2] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [3] Warpani, Suwardjoko. (2012). Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung : Penerbit Itb.
- Mashun, Mohammad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta, BPEF. Yogyakarta
- [5] Renaldi Saputra (2019). Ejournal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman.
- [6] Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung : Alfabeta CV.
- [7] Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (mix methods). Bandung : Alfabeta.
- [8] Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makasar : CV Syakir Media Press.
- [9] Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan.